



Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Media Online Kompas.Id Edisi Februari 2023)

Muhammad Yusuf Iqbal¹, Mayasari², Yanti Tayo³

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Abstract

Received: 24 April 2024
Revised : 01 Mei 2024
Accepted: 08 Mei 2024

Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis focuses on language as a tool of power practice. Fairclough's CDA comments text (micro) with the society context (macro) through the three basics analysis (Text, Discourse Practice, Sociocultural Practice) as the focus of the researcher in conducting an analysis of the discourse on extending the president's term in February 2023 edition of Kompas.id. Qualitative descriptive is the method in this research. Researcher used literature studies and documentation technique. The research results show the linguistic tools used are diction, modality, intertextuality, interdiscursivity, and repetition. At the text production level is the Kompas Daily team which is distributed via online media kompas.id. At the text consumption level, there is no comment response because kompas.id is premium media from Kompas. On the macro dimension, the situational level is this news was motivated by the discourse on extending the term which re-emerged in 2023. At the institutional level, this news was influenced by MPR and legal experts from University of Indonesia. The social level of this news was the spread of the hashtags #2024Gantian and #TolakPerpanjanganMasaJabatan and demonstrations against extending the term by community groups and college students so that the MPR stated there was no suggestion regarding this discourse from MPR members.

Keywords: *kompas.id, Online Media, Discourse on Extending The President's Term, Critical Discourse Analysis*

(* Corresponding Author: 1810631190181@student.unsika.ac.id

How to Cite: Iqbal, M. Y., Mayasari, & Tayo, Y. (2024). Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden (Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough Pada Media Online Kompas.Id Edisi Februari 2023). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180228>.

PENDAHULUAN

Keberadaan masa jabatan tentu menjadi hal yang seharusnya berjalan mulus dengan tidak adanya masalah karena telah diatur dalam UUD 1945 yang dimana menjadi dasar negara. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini masih gencar sebuah wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi sorotan media massa di Indonesia.

UUD 1945 pada Pasal 4 (1) memberikan penekanan pada aturan sistem ketatanegaraan. Menurut UUD 1945, presiden memberi pengaturan yang dominan terhadap kekuasaan pemerintahan negara. Adapun tanggung jawab presiden atas pemerintahan menjadi prinsip utama dalam pembentukan pemerintahan, penyusunan kabinet, pengangkatan dan pemberhentian menteri dan pejabat publik yang pengangkatannya dilakukan berdasarkan *political appointment*. Indonesia memilih sistem demokrasi pada pemilihan presiden.

Adanya pemilihan presiden melalui pemilu dilakukan dengan partisipasi rakyat ikut meningkatkan kesadaran politik rakyat dalam berpartisipasi secara aktif demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Penyelenggaraan pemilu bergaris lurus dengan UUD 1945 yang menjadi refleksi demokrasi untuk mendapatkan bentuk dalam sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat. Penetapan masa jabatan presiden telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 7 “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Masa jabatan adalah waktu dalam menjalankan kekuasaan atau biasa disebut masa bakti oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan tertentu. Istilah masa jabatan ini biasa dipakai untuk pemimpin sebuah organisasi, partai politik, maupun pemimpin negara. Di Indonesia, masa jabatan dari tiap jabatan yang diamban berbeda. Semua masa jabatan telah diatur dalam undang – undang atau anggaran dasar yang berlaku. Penghitungan masa jabatan yang berlaku seperti tiga, lima, dan enam tahun itu dapat disebut periode.

Analisis wacana kritis Norman Fairclough didasari oleh sebuah pertanyaan besar, yaitu bagaimana menghubungkan teks yang mikro dengan konteks masyarakat yang makro. Norman Fairclough berusaha membangun sebuah model analisis wacana yang berkontribusi dalam analisis sosial serta budaya. bagaimana relasi kuasa dibalik teks dan bagaimana kekuasaan ideologis diartikulasikan secara tekstual dengan 3 elemen dasar yaitu analisis teks, analisis praktik wacana dan analisis praktik sosiokultural.

Wacana perpanjangan masa jabatan ramai dibicarakan dan diperdebatkan oleh banyak orang di Indonesia. Wacana tentang perpanjangan masa jabatan presiden Joko Widodo dibicarakan di media massa, salah satu portal berita yang membahas wacana tersebut adalah portal media berbasis daring, *kompas.id*. *Kompas.id* merupakan inovasi digital dari Harian Kompas yang dapat diakses lewat aplikasi maupun lewat *website*. *Kompas.id* hadir menjadi salah satu respon dari Harian Kompas terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat yang terjadi dengan selalu menjaga nilai – nilai jurnalistik khas Harian Kompas. *Kompas.id* merupakan situs premium Harian Kompas yang menjadi ekstensa konten versi cetak (*Kompas.com*, 2018).

Adapun pertanyaan penelitian berdasar pada penjabaran latar belakang diatas meliputi:

- a. Bagaimana analisis teks “Perpanjangan Masa Jabatan Presiden” direpresentasikan *kompas.id* edisi Februari 2023?
- b. Bagaimana Praktik Wacana (*Dicourse Practice*) “Perpanjangan Masa Jabatan Presiden” direpresentasikan *kompas.id* edisi Februari 2023?
- c. Bagaimana Praktik Sosiokultural (*Sociocultural Practice*) “Perpanjangan Masa Jabatan Presiden” direpresentasikan *kompas.id* edisi Februari 2023?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori Analisis Wacana Kritis model Norman Fairclough. Pendekatan kualitatif ini memiliki fokus perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala sosial di masyarakat. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menekankan kualitas data dan ketajaman

data yang digunakan (Mahardika & Farida, 2019). Penelitian ini disajikan menggunakan uraian kata-kata, maka digunakanlah metode kualitatif deskriptif. Metode deskriptif adalah penelitian yang dirancang untuk mengumpulkan, menganalisa, serta menyajikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Teks

Analisis dimensi teks dalam penelitian ini pada penelitian ini difokuskan bagaimana bahasa digunakan dalam pengkonstruksian wacana pada pemberitaan “Tak Ada Pembahasan Soal Penundaan Pemilu Di MPR” dari media *online kompas.id*. Dalam analisis teks pemberitaan ini didapatkan empat penggunaan alat kabahasaan yaitu diksi, modalitas, intertekstualiti, interdiskursiviti, dan repetisi.

Diksi.

Representasi Aktor Melalui Diksi

Diksi **Dia/Ia** menunjukkan bahwa aktor atau pelaku dalam wacana yaitu Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid, Jazilul Fawaid, dan Titi Anggraini. Diksi Dia/Ia digunakan dalam pemberitaan tersebut banyak digunakan setelah aktor atau pelaku memberikan pernyataan. Diksi Dia/Ia digunakan empat kali dalam isi pemberitaan yang telah dianalisis.

I. “**Ia** mengingatkan, masih terdengarnya suara yang menginginkan..” (K, 5 Februari 2023)

II. “Bahkan, menurut **dia**, pemerintah seharusnya tidak diam..” (K, 5 Februari 2023)

III. “**Ia** menyebut, pada dasarnya sudah tidak ada lagi alasan yang tepat untuk menunda pemilu,” (K, 5 Februari 2023)

IV. “**Ia** sekaligus mengkritik pernyataan...” (K, 5 Februari 2023)

Selanjutnya, Penyebutan dari pelaku/aktor yang digunakan dalam pemberitaan diatas adalah **Ucapnya**. Diksi **Ucapnya** muncul sebanyak empat kali yang ditujukan kepada Arsul Sani, Hidayat Nur Wahid, Jazilul Fawaid, dan Titi Anggraini. Menurut KBBI (2016) **Ucapnya** merupakan kata turunan dari Ucap yang memiliki arti dalam kelas nomina dari nama seseorang, tempat, maupun benda.

I. “... kita bisa rasakan semua mungkin siapa,” **ucapnya**.” (K, 5 Februari 2023)

II. “...Satu orang pun tidak ada yang mengusulkan,” **ucapnya**.” (K, 5 Februari 2023)

III. “...Kalau rakyat mau ditunda, ya ditunda saja,” **ucapnya**.” (K, 5 Februari 2023)

IV. “...karena hal yang sedang diperbincangkan berpotensi merusak demokratisasi di negara ini,” **ucapnya**.” (K, 5 Februari 2023)

Representasi Peristiwa Melalui Diksi

Diksi **Wacana** menyatakan bahwa wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden membuat kondisi politik tidak pasti yang menggambarkan sebuah peristiwa.

Diksi **Penundaan** yang diulang sebanyak sembilan kali yang diterangkan sebagai bentuk penundaan pemilu yang digambarkan sebagai sebuah peristiwa.

Diksi **Perpanjangan Masa Jabatan** yang mana merupakan fokus dari pembahasan di pemberitaan karena muncul pada tahun 2022 dan kembali muncul di 2023 dengan penambahan yaitu Perpanjangan Masa Jabatan dan Penundaan Pemilu yang dimana menggambarkan suatu peristiwa.

Modalitas

Modalitas dalam wacana kepemimpinan biasanya terdapat pada sebagian besar kata yang memiliki arti perintah dan permintaan, misalnya modalitas mesti, harus, jangan, perlu, hendaklah, sepatutnya, dan lain-lain, cara penggunaan ini menggambarkan bahwa pemimpin menyalurkan kekuasaan melalui modalitas yang digunakannya (Mayasari & Darmayanti, 2019). Berdasarkan hal tersebut, hasil penelitian ini menemukan ada enam kata perintah melalui kata **harus** dan **jangan**.

Intertekstualiti

Penanda negasi digunakan untuk menggambarkan suatu polemik. Penanda negasi juga membawa tipe khusus dari praanggapan (yang telah disebutkan sebelumnya) (Mayasari & Darmayanti, 2019). Contoh negasi ditekankan dengan penggunaan kata **Tidak**. Penggunaan negasi ditegaskan melalui hasil analisis peneliti yang dimana digunakan sebanyak dua belas (12) kali yang memiliki maksud berbeda – beda tiap penyebutannya.

Interdiskursiviti

Wacana dalam interdiskursiviti merujuk pada dimensi teks syang secara umum didefinisikan sebagai isi, ide, tema, topik, dsb. Misalnya wacana feminis, wacana politik, wacana pendidikan, dll (Mayasari & Darmayanti, 2019). Wacana politik sendiri adalah pembahasan atau perbincangan masalah politik. Berdasarkan hal tersebut, pemberitaan ini didominasi oleh pembahasan politik mengenai masa jabatan dan penundaan pemilu. Selain itu, topik yang dibahas dalam pemberitaan ini merujuk pada bagaimana tanggapan pelaku politik mengenai wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Maka dari itu, peneliti merujuk bahwa interdiskursiviti pemberitaan ini yaitu wacana politik.

Repetisi

Pada pemberitaan “Tak Ada Pembahasan Soal Penundaan Pemilu di MPR” ditemukan lima jenis repetisi yaitu, repetisi anafora, mesodiplosis, epifora, epanalopsis dan tautotes.

Repetisi anafora pada pemberitaan ini ditemukan pada kalimat “**kalau** penundaan itu hanya kepentingan orang tertentu saja, ya PKB *off* dulu, tetapi **kalau** penundaan itu untuk kepentingan rakyat, PKB ada di situ. **Kalau** rakyat mau ditunda, ya ditunda saja”.

Repetisi mesodiplosis ditemukan melalui empat kata yaitu **harus** “kita dalam bernegara **harus** taat pada konstitusi. Manuver seperti itu **harus** dihentikan”, **kelompok** “PPP tetap berada dalam **kelompok** yang menginginkan penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan sesuai jadwal,... masih terdengarnya suara yang menginginkan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan tersebut karena memang ada **kelompok** yang menyuarakannya”, **wacana** “Ia sekaligus mengkritik pernyataan yang menyebut perbincangan mengenai **wacana** tersebut

wajar terjadi di negara dengan sistem demokrasi... Pemberlakuan **wacana** tersebut juga dapat menciptakan instabilitas karena berpotensi menimbulkan gelombang protes yang besar dari masyarakat”, dan **penundaan** “jika **penundaan** pemilu dilakukan dengan alasan rasional,... kalau **penundaan** itu hanya kepentingan orang tertentu saja,... tetapi kalau **penundaan** itu untuk kepentingan rakyat,... , masih bergulirnya wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan **penundaan** pemilu mengindikasikan adanya kelompok yang mencoba memanfaatkan agenda tersebut untuk kepentingan politiknya”.

Lalu ada repetisi epifora yang ditemukan pada pemberitaan ini melalui kata **demokrasi** “Ia sekaligus mengkritik pernyataan yang menyebut perbincangan mengenai wacana tersebut wajar terjadi di negara dengan sistem **demokrasi**. Hal ini kontradiktif karena topik penundaan pemilu jelas akan mencederai **demokrasi**”.

Pada pemberitaan ini ditemukan repetisi epanalopsis lewat kata **itu** “**itu** untuk mengingatkan bahwa memang masih ada kelompok yang menyingkinkan **itu**”.

Dan repetisi terakhir yang ditemukan pada pemberitaan ini adalah repetisi tautotes lewat dua kata, yaitu **wacana** “Bila ada pihak menyebut bahwa wajar **wacana-wacana** seperti ini diperbincangkan di negara demokrasi” dan kata **masa** “Mengubah masa jabatan presiden dan mengatur ulang masa pelaksanaan pemilu perlu dilakukan lewat amendemen konstitusi”.

Analisis Praktik Wacana

Level Produksi Teks

Pada penelitian ini, produksi teks berasal dari Raynard Kristian Bonanio Pardede sebagai jurnalis dari Kompas yang bersumber dari tim redaksi Harian Kompas yang di buat pemberitaannya lewat Harian Kompas dan *kompas.id*.

Menurut studi kepustakaan yang peneliti lakukan, tidak adanya hubungan emosional antara Raynard Kristian Bonanio Pardede dengan setiap partisipan berita dan apa yang ditulis dalam pemberitaan diatas merupakan pernyataan fakta dari tiap partisipan berita.

Level Penyebaran Teks

Pada level penyebaran, pemberitaan tersebut disebarkan lewat media *online kompas.id*. *Kompas.id* merupakan situs premium. Untuk melihat pemberitaan di *kompas.id* diharuskan untuk mendaftar sebagai anggota dan dapat melihat 5 pemberitaan secara gratis dalam satu bulan. Untuk dapat melihat pemberitaan secara bebas, diperlukan nominal uang sebesar Rp.50.000,00 untuk berlangganan.

Level Konsumsi Teks

Pada level konsumsi, penelitian lewat pemberitaan yang telah diunggah oleh *kompas.id* pada tanggal 5 Februari 2023 pada pukul 22.16 WIB tidak ada satupun yang berkomentar pada pemberitaan ini dan *kompas.id* tidak menyediakan fitur reaksi dan jumlah pembacanya dikarenakan *kompas.id* membuat persona sebagai media online premium.

Analisis Praktik Sosiokultural

Level Situasional

Teks diproduksi dalam kondisi atau suasana tertentu, jika wacana dipahami sebagai tindakan, hal tersebut merupakan upaya untuk menanggapi situasi atau konteks sosial tertentu (Mayasari & Darmayanti, 2019).

Berawal dari sebuah wacana yang diinisiasi oleh seorang pengamat politik yakni Muhammad Qodari pada Juni 2021 menggagaskan sebuah kelompok bernama Jokowi-Prabowo 2024 atau disingkat JokPro 2024 yang bertujuan untuk mencegah polarisasi ekstrem yang terjadi di Indonesia dengan mengusahakan amandemen UUD 1945. Pada awalnya Qodari menggagaskan untuk memperpanjang masa jabatan presiden bukan menunda pemilu 2024 sehingga nantinya Jokowi selaku presiden bisa menjalankan periode ketiga. Namun, gagasan Qodari ini ditolak banyak pihak sehingga pada Agustus 2021 wacana ini menghilang begitu saja. 6 bulan kemudian, pada Maret 2022 wacana perpanjangan masa jabatan presiden kembali muncul dan sedikit mengubah gagasan yaitu menjadi penundaan pemilu 2024 yang intisarinnya adalah perubahan konstitusi dan amandemen UUD 1945. Hingga titik puncaknya ketika beberapa menteri ikut menyuarakan dan mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

Per Maret 2022 hingga pemberitaan ini diunggah pada Februari 2023, wacana ini masih simpang siur walaupun Presiden Joko Widodo telah menyatakan bahwa dirinya menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden pada akhir bulan Maret 2022. Lalu, pada bulan Desember 2022 ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu 2024 bisa saja diloloskan tetapi tidaklah mudah dan keputusan akhirnya ada pada ketua umum partai politik yang ada di parlemen. Setelah itu, Wakil Menteri Hukum & HAM dari partai Golkar menyatakan bahwa ada kelompok tertentu dalam tubuh pemerintahan yang menginginkan wacana tersebut lolos lewat Sidang Istimewa MPR.

Wakil Ketua MPR dari 2 fraksi berbeda yaitu PPP dan PKB menjelaskan bahwa tidak ada pimpinan dan anggota MPR yang sepakat untuk melaksanakan Sidang Istimewa untuk amandemen UUD 1945 walaupun syarat amandemen adalah 1/3 anggota MPR setuju mengamandemen UUD 1945 per 5 Februari 2023.

Norman Fairclough menerangkan bahwa ketika wacana dipahami sebagai suatu tindakan tersebut sebenarnya merupakan respon terhadap situasi atau konteks sosial tertentu dan kemudian wacana ini sebenarnya dipahami sebagai suatu tindakan. Seperti pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden ini bahwa ada tujuan tertentu dibalik munculnya wacana tersebut agar dapat diubahnya konstitusi dan telah ditolak oleh MPR.

Level Institusional

Dalam level institusional peneliti menemukan adanya pengaruh MPR sebagai institusi pemerintah terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu 2024 terjadi. Sebagai institusi yang bersifat legislatif sehingga mampu untuk menetapkan atau mengamandemen sebuah konstitusi yaitu UUD 1945 yang mengatur tentang periode masa jabatan. Walaupun pada akhirnya melalui pemberitaan ini, MPR sepakat untuk tidak mengamandemen perundang-undangan yang berlaku dikarenakan tidak ada satupun anggota MPR yang mengusulkannya.

Level Sosial

Dalam level sosial, wacana perpanjangan masa jabatan presiden memberikan dampak yang besar di masyarakat umum, mengapa demikian? Karena masyarakat pada umumnya telah jengah atas ketidakberesan Joko Widodo terhadap masalah – masalah nasional yang terjadi. Dampak sosial yang begitu banyak sehingga masyarakat menggaungkan tagar #TolakPerpanjanganMasaJabatan dan #2024Gantian serta adanya aksi demonstrasi dari berbagai golongan masyarakat di depan gedung DPR/MPR.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini berdasarkan dari 3 elemen dasar AWK Fairclough, dalam analisis teks alat kebahasaan yang digunakan kompasd.id dalam pemberitaan ini adalah diksi yang diksi yang merepresentasikan aktor dan peristiwa. Modalitas deontik melalui kata haru dan jangan yang merepresentasikan kuasa. Negasi “Tidak” yang merepresentasikan ideologi. Interdiskursiviti wacana politik yang membalut pemberitaan tersebut. Repetisi anafora, epifora, mesodiplosis, epanalopsis, dan tautotes sebagai penegasan.

Pada analisis praktik wacana dalam level produksi teks. Pihak yang terlibat dalam produksi pemberitaan “Tak Ada Pembahasan Soal Penundaan Pemilu di MPR” adalah tim redaksi Harian Kompas. Pemberitaan disebarakan melalui media online kompas.id. Pengkonsumsian terhadap pemberitaan ini tidak menghasilkan respon apapun di kolom komentar.

Pada level situasional, pemberitaan “Tak Ada Pembahasan Soal Penundaan Pemilu di MPR” dilatar belakangi oleh munculnya kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden di 2023, yang mana wacana tersebut pernah muncul di tahun 2022 yang menyebabkan petinggi MPR selaku pemegang kekuasaan legislatif mengenai UUD 1945 menyatakan bahwa tidak ada satupun anggota MPR yang mengusulkan sidang untuk menggubris wacana tersebut. Pada level institusional, pemberitaan ini dipengaruhi oleh MPR selaku instansi pemerintahan yang mengeluarkan pernyataan mengenai wacana yang beredar di masyarakat. Di level sosial, masyarakat mengunggah dan menyebarluaskan tagar #2024Gantian dan #TolakPerpanjanganMasaJabatan, selain itu beberapa golongan masyarakat serta mahasiswa mengadakan aksi demo di depan gedung DPR/MPR untuk mengaspirasikan penolakan perpanjangan masa jabatan presiden.

Saran dari penelitian ini untuk pihak-pihak terkait dimohon untuk lebih tegas dan menjalankan kenegaraan dengan prinsip dari UUD 1945 dan untuk *kompas.id* untuk menambahkan fitur respon dari pembaca selain komentar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambar. (2017). *Analisis Wacana Kritis - Pendekatan - Konsep*.
<https://pakarkomunikasi.com/analisis-wacana-kritis>
- Mursalati, A. A. (2014). *Analisis Wacana Kritis Terhadap Pemberitaan Klarifikasi Kasus Tertangkapnya Ketua PWNU Banten Dalam Razia Penyakit Masyarakat Di Harian Radar Banten*.
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/26551/1/ARSI_TTA_AGHNIYA_MURSALATI-FDK.pdf

- Amanah, R. (2021). *Analisis Framing Berita Jokowi 3 Periode Pada Portal Media Online Tempo.co Dan CNNIndonesia.com*.
- Diniyanto, A. (2021). *Isu Jabatan Presiden Tiga Periode dan Ketidakkonsistenan Berkosensus*. Artikel Hukum. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=417>
- Eriyanto, 2006. *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media*, Lkis, Yogyakarta.
- Khairul Fahmi (ed.), 2016. *Pengisian Jabatan Publik Dalam Ranah Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Rajawali Pers. hal. 151
- Miriam Budiarto, 1990. *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, (Jakarta: Jurnal Ilmu Politik, No. 10, Hal 37
- Nyarwi, N. 2008. *Paradoks Media sebagai Pilar Keempat Demokrasi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 12(2), 151-173.
- Risky Ariestandi Irmansyah, 2009. *Hukum Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 114
- Sigit Pamungkas. 2012. *Pemilu, Perilaku Pemilih dan Kepartaian*. IDW Press.
- Sobur Alex, *Analisis Teks Media*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006 Yogyakarta. Hal 3
- Nursanti, S., Utamidewi, W., & Tayo, Y. (2021). Kualitas Komunikasi Keluarga tenaga kesehatan dimasa Pandemic Covid-19. *Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies)*, 5(1), 233. <https://doi.org/10.25139/jsk.v5i1.2817>
- Febrian, H., Tayo, Y., Ramdhani, M., Karawang, U. S., Perantau, M., Tua, O., & Johari, T. J. (2023). *Keterbukaan Diri Mahasiswa Perantau Kepada Orang Tua (Studi Deskriptif Kualitatif pada Mahasiswa Perantau Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Singaperbangsa Karawang Angkatan 2022)*. 7, 16520–16524.
- Fauzi, R., Mayasari, & Rifai, M. (2022). Pemberitaan Kebijakan Joko Widodo Dalam Mencegah Penularan Virus Omicron : Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough 1. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.